

# Press Release Kapolri Akhir Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005

SEBAGAIMANA program yang direncanakan pada setiap saat menjelang akhir tahun kita mengadakan Press Release. Kesempatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik, guna dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai situasi Kamtibmas ataupun hasil pelaksanaan tugas Polri secara umum selama tahun 2005.

Materi yang disampaikan pada kesempatan Press Release Kapolri akhir tahun 2005 meliputi tiga hal pokok antara lain :

1. Gambaran dan evaluasi Kamtibmas secara umum tahun 2005
2. Mengenai pelaksanaan tugas Polri tahun 2005
3. Prediksi perkembangan Kamtibmas tahun 2006

Selama periode tahun 2005 selain ada beberapa kegiatan Kepolisian yang dilaksanakan untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia, terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penerahan kekuatan Polri yang cukup besar dibantu unsur lain guna mengamankan pelaksanaannya. Antara lain Pengamanan Bencana Alam Nasional Pasca Tsunami di NAD/Aceh, pengamanan Pilkada di berbagai kewilayahan, pengamanan Lebaran 2005 serta Natal 2005 maupun Tahun Baru 2006.

## Gambaran dan evaluasi Kamtibmas 2005

Situasi Kamtibmas tahun 2005 secara umum dapat dikatakan cukup kondusif, walaupun terdapat beberapa kejadian yang menonjol namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa kegiatan pengamanan seperti pengamanan Pasca Bencana Alam Nasional Tsunami, Pilkada, Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan pemerintah maupun pengamanan kegiatan masyarakat lainnya.

Selama periode tahun 2005 berbagai tindak kejahatan termasuk tindakan Kepolisian dan upaya penggalangannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**Kejahatan Konvensional;** trend kejahatan ini senantiasa mendominasi berbagai kejadian setiap tahunnya. Dalam tahun 2005 telah terjadi 220.123 kasus yang meliputi kejadian pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan dan pemerkosaan serta pencurian dengan pemberatan. Bilamana dievaluasikan dengan tahun 2004 yang terjadi sebanyak 208.532 kasus, maka keadaan kasus tahun 2005 ini mengalami peningkatan 11.591 kasus atau 5,26%.

**Kejahatan trans nasional;** beberapa kesepakatan dalam ASEANAPOL beberapa kejahatan yang digolongkan pada tingkatan trans nasional, antara lain, terorisme, illegal drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, money laundering, trafficking in person (woman & children), cyber crime, serta international economic crime. Pada katagori kejahatan dimaksud, selama tiga tahun terakhir dapat diketengahkan dengan angka rata-rata sebagai berikut; tahun 2003 sebanyak 9.155 kasus, tahun 2004 sebanyak 9.661 kasus dan tahun 2005 sebanyak 9.625 kasus.

Sesuai analisa tersebut terlihat adanya penurunan pada tahun 2005 ini sebanyak 36 kasus atau 0,37%. Namun dalam perkembangannya menyangkut kejahatan trans nasional ini terdapat peningkatan pada kasus narkoba. Dari 7.680 kasus tahun 2004 menjadi 9.623 kasus tahun 2005 atau meningkat 1.943 atau 25,92 %. Sedangkan jenis kasus terorisme (Bom) menunjukkan adanya kondisi yang menurun. Dari 303 kasus tahun 2003 menjadi 194 kasus tahun 2004 dan 144 kasus tahun



Kapolri Jenderal Pol. Sutanto

2005. Hal ini sejalan dengan di intensifikannya langkah preventif dan preventif, termasuk penindakan hukum atas keterlibatan jaringan terorisme selama tahun 2005.

**Kejahatan terhadap kekayaan Negara;** penggolongan terhadap berbagai kejahatan terhadap kekayaan Negara, merupakan tindak kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian pada kekayaan Negara seperti; korupsi, illegal logging, illegal fishing dan pengrusakan lingkungan hidup. Selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 perkembangan dapat dikemukakan sebagai berikut ; Tahun 2003 sebanyak 2.290 kasus, tahun 2004 sebanyak 2.214 kasus dan tahun 2005

sebanyak 1.752 kasus. Untuk jenis kejahatan terhadap kekayaan negara ini maka kasus tertentu dapat dijelaskan perkembangannya yaitu :

**Korupsi;** dari 253 kasus korupsi yang dilaporkan, selama tahun 2005 ini, sejumlah perkara sedang menjalani proses penyelesaian sebanyak 145 kasus, sedangkan yang telah dinyatakan P-21/lengkap sebanyak 76 kasus dan dalam proses kelengkapan administrasi/P-19 sebanyak 20 kasus. Adapun 5 kasus dinyatakan SP-3 dan 7 kasus dilimpahkan pada instansional teknis terkait.

**Illegal Logging;** dalam periode tahun 2005 ini penanggulangan terhadap illegal logging dilakukan secara intensif. Kegiatan rutin Kepolisian pada perkara: LP-kasus 985 berkas, tersangka 1.229 orang, kirim JPU 118 berkas dan di SP-3 4 kasus. Terhadap barang bukti disita, kayu bulat 85.503 batang, kayu olahan 27.975 M<sup>3</sup>, kapal 117 unit, mobil/truck 365 unit, alat berat 73 unit dan chainsaw 37 set.

Operasi Hutan Lestari 2005, hingga pada tahap perkara: LP-Kasus 107 berkas, tersangka 186 orang, kirim JPU 74 berkas dan di SP3 12 kasus. Terhadap barang bukti yang disita, kayu bulat 76.481 batang, kayu olahan 30.288 M, kapal 5 unit, mobil/truck 131 unit, alat berat 933 unit dan chainsaw 112 set.

**Illegal Fishing;** dalam penanganan illegal fishing bekerjasama dengan Kementerian Kelautan & Perikanan, berhasil melakukan penegakan hukum terhadap tersangka sebanyak 60 orang yang terlibat dalam 23 kasus illegal fishing di wilayah Indonesia.

**Pengrusakan lingkungan hidup;** penanggulangan terhadap penambangan liar tanpa izin/Peti yang berdampak terhadap pengrusakan lingkungan dilakukan berdasarkan operasi Kepolisian No. Pol. : Sprin/737/VII/2005 tanggal 12 Agustus 2005. Berbagai kasus yang dapat diungkap dalam operasi dimaksud antara lain ; penambangan illegal 34 kasus, penyimpangan BBM 63 kasus, penyimpangan administrasi izin 7 kasus dan tersangka 88 orang.

Tindakan kejahatan lainnya yang perlu mendapatkan prioritas penanganannya sesuai komitmen yang tertuang dalam Telegram Kapolri No. Pol.: TR/652/ VII/2005 tanggal 19 Juli 2005 dapat diketengahkan antara lain pemberantasan perjudian dan pemberantasan premanisme.

Pemberantasan perjudian dalam tahun 2005 tercatat tindak kejahatan perjudian sebanyak 12.142 kasus yang dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan manakala dibandingkan



tahun 2004 sebanyak 4.992 kasus meningkat 7.150 kasus atau 143%. Langkah Kepolisian untuk menekan kejahatan premanisme selama tahun 2005 dilakukan secara *offensive*.

**Kejahatan berimplikasi kontijensi;** kejahatan yang berimplikasi kontijensi meliputi ancaman terhadap keamanan negara, konflik sara dan unjuk rasa anarkis. Spesifikasi terhadap kejahatan ini didominasi oleh berbagai kejadian yang ada di beberapa wilayah yaitu gerakan separatis bersenjata di Aceh, separatis Republik Maluku Selatan di Ambon, Konflik horizontal di Poso dan separatis organisasi Papua Merdeka. Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan tersebut, Polri menggelar operasi Kepolisian terpusat maupun kewilayahan meliputi Renops Reksi 2005 di Aceh, Ops Mutiara 2005 di Ambon dan Ops Sintuwu Maroso 2005 di Poso. Dari berbagai aktivitas operasi tersebut dapat diwujudkan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam gelar operasi Kepolisian selanjutnya.

Dari berbagai jenis gangguan Kamtibmas sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat diketahui beberapa peristiwa menonjol yang menjadi atensi selama tahun 2005 antara lain:

1. Terbongkarnya pabrik gelap *extacy* dan peredarannya pada tanggal 8 April 2005 di Bojong Ciampea dan Jasinga Bogor. Pada tanggal 11 Nopember 2005 ditemukan di Cikande Serang, Banten dan pada tanggal 23 Nopember 2005 kembali terbongkar pabrik gelap *extacy* di Banyuwangi Malang Jawa Timur.
2. Peledakan Bom Tentena Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Mei 2005.
3. Peledakan Bom Ambon pada tanggal 25 Agustus 2005.
4. Jatuhnya pesawat Mandala Air Lines di sekitar Bandara Polonia Medan Sumut.
5. Peledakan bom Bali II-2005 di Jimbaran dan Denpasar Bali pada tanggal 1 Oktober 2005.
6. Terbunuh DR: Azhari cs (tokoh teroris/bom) di Batu Malang pada tanggal 9 Nopember 2005.
7. Pembunuhan terhadap 3 siswa pelajar putri SMAK-Poso pada tanggal 29 Oktober 2005.
8. Perampokan emas seberat 4 kg di Toko Cahaya Emas Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2005.

Memperhatikan berbagai aktivitas operasional Kepolisian selama tahun 2005 maka selain didapatkan langkah positif dari berbagai kegiatan yang dilakukan, terdapat pula beberapa tindakan pelanggaran sejumlah oknum anggota Polri yang mengakibatkan menurunnya citra Polri di mata masyarakat, seperti keterlibatan oknum Polri dalam *illegal logging*,

penyalahgunaan jabatan/korupsi, maupun tindakan kejahatan lainnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan PNS baik pelanggaran disiplin, tata tertib disiplin maupun pidana pada tahun 2005 terjadi pelanggaran sebanyak 15.284 kasus dengan rincian : pelanggaran disiplin = 3.267 kasus, pelanggaran tata tertib disiplin = 11.245 kasus dan pelanggaran pidana = 772 kasus. Pelanggaran hukum tersebut telah ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan tindakan hukum terhadap oknum Polri yang terlibat dengan memproses secara hukum sebagaimana aturan yang berlaku.

### Prediksi perkembangan Kamtibmas Tahun 2006

Mencermati evaluasi perkembangan situasi Kamtibmas selama tahun 2005, maka kondisi saat ini maupun perkiraan perkembangan selanjutnya terhadap gangguan Kamtibmas pada tahun 2006 diperkirakan akan menimbulkan berbagai kemungkinan.

1. **Kejahatan konvensional;** masih akan didominasi dengan bentuk kejahatan terhadap ancaman harta benda seperti **pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penggelapan, penipuan** serta **pemeriksaan** maupun kejahatan lain yang berlatar belakang kondisi ekonomi, sebagai dampak pengangguran yang belum teratasi secara signifikan.
2. **Kejahatan trans-nasional;** bentuk tindakan kejahatan yang menonjol akan terjadi dalam bentuk **terorisme, penyalahgunaan Narkoba, penyelundupan senjata api/bahan peledak, perdagangan manusia, perampokan laut, pencucian uang, cyber crime dan kejahatan perbankan.**
3. **Kejahatan terhadap kekayaan negra;** berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian atas kekayaan negara banyak mendominasi dalam bentuk tindak kejahatan **illegal logging, penyelundupan barang, illegal fishing/pencurian ikan, illegal mining/penambangan tanpa izin, maupun tindak pidana korupsi.**
4. **Kejahatan yang berdampak/berimplikasi kontijensi;** daerah rawan tertentu masih didapatkan **ancaman konflik** baik vertical maupun horizontal, sehingga diperlukan kewaspadaan berbagai pihak atas tindak kejahatan dengan kontijensi seperti, Ancaman Bom/terorisme, unjuk rasa yang anarkis serta destruktif, kerusuhan massal, perkelahian massal/antar warga dan golongan, bencana alam yang tidak tertangani secara konstruktif, bentrok aparat negara dengan masyarakat dan kegiatan kelompok separatis di wilayah tertentu (Aceh, Papua dan Maluku).

Mengantisipasi masalah ancaman gangguan Kamtibmas dimaksud, maka Polri mengintensifkan beberapa langkah strategis antara lain :

1. Memprioritaskan upaya teknis Kepolisian di bidang **preventif dan pre-emptif dengan dukungan penegakan hukum** secara intensif, dengan melanjutkan pembangunan kekuatan personil Polri yang mengarah pada rasio perbandingan Polri dan penduduk mencapai 1 : 650 dengan prioritas perkuatan personil pada tingkat Polres dan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat maupun pusat deteksi informasi Kamtibmas.
2. Peningkatan **profesionalisme** di bidang **penyelidikan dan penyidikan** dalam rangka penegakan hukum.
3. Intensifikasi dukungan **alat komunikasi dan mobilitas serta sarana Markas Kesatuan** dalam rangka pemberdayaan pelayanan masyarakat secara optimal.
4. Meningkatkan **kerjasama internasional** dalam rangka peningkatan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan dukungan peralatan khusus, peralatan utama, maupun perluasan jaringan informasi Kepolisian.\*\*\*

Sambutan Kapolri pada Sertijab Kapolda Jabar

# Tugas Polri tidak Semata-mata Sebagai Pemadam Kebakaran

PADA tahun-tahun terakhir ini beberapa permasalahan yang cukup berat dihadapi oleh Polisi, tentunya karena perkembangan situasi di lapangan dan juga tuntutan masyarakat yang semakin deras terutama terhadap peran Polri. Terlebih dengan situasi keterbukaan sekarang dimana masyarakat menuntut pelayanan Polri yang lebih baik, transparan, akuntabel dan tentu hal ini harus direspon dengan baik.

Kalau menyimak perjalanan tugas yang dihadapi, pada tahun-tahun yang lalu, terutama belakangan ini, beberapa hal diwarnai dengan tantangan dan hambatan yang memerlukan pengerahan pemikiran dan kerja keras serta keterlibatan kita secara all out untuk menghadapi semua tantangan dan hambatan tersebut. Kalau kita ingat bagaimana kita menangani musibah bencana alam yang besar tsunami, dimana tsunami tidak hanya melanda Indonesia tapi beberapa negara lainnya. Pada musibah itu Indonesia adalah paling parah, termasuk anggota Polri beserta peralatannya, mengalami kehancuran, karena terkena musibah tsunami. Disamping kita membenahi ke dalam, juga harus melakukan pertolongan kepada masyarakat. Dalam waktu yang sama kita juga harus tetap melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memelihara keamanan masyarakat, penegakan hukum dan pengayoman kepada masyarakat yang ada di Aceh khususnya. Ini tentunya melibatkan berbagai anggota dari berbagai daerah termasuk juga dari Jawa Barat ada yang dikirimkan ke daerah Aceh. Hal-hal lain yang mewarnai bahasan tugas

pada masa yang lalu tentunya kita melihat bagaimana dinamika aspek-aspek kehidupan nasional pada masa itu.

Di bidang politik juga kita melihat bagaimana Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I maupun tingkat II yang jumlahnya hingga 200 lebih, tentunya ini juga memerlukan perhatian konsentrasi, karena potensi konflik dari Pilkada tersebut cukup tinggi.

Melihat bagaimana manuver politik dari calon-calon Kepala Daerah, untuk memenangkan dengan cara-cara yang tidak etis, pada politik dengan memalsukan tanda tangan dan sebagainya. Petugas kita respon, mencegah jangan sampai terjadi gangguan-gangguan keamanan akibat Pilkada tersebut diseluruh wilayah Indonesia.

Konflik internal Parpolpun terjadi, beberapa Parpol besarpun mengalami konflik-konflik seperti PPP, PBR, PKB, PDIP dan lain-

lainnya, yang tentunya kalau tidak diantisipasi bisa terjadi gangguan-gangguan keamanan. Contoh jelas misalnya bagaimana PKB di Jawa Timur, saat salah satu pihak melaksanakan pertemuan namun pihak lainnya mengupayakan supaya tidak berlangsung pertemuan tersebut. Kalau tidak kita antisipasi dan diamankan pasti terjadi konflik-konflik di lapangan.

Di bidang politik misalnya otonomi daerah, persepsi yang tidak sama antara pusat dan daerah dalam penafsiran Undang-Undang yang berlaku, sehingga terjadi masalah-masalah yang tumpang tindih yang akhirnya terjadi gangguan keamanan.

Contoh misalnya pengelolaan hutan, daerah merasa berhak, sementara pusat merasa milik pusat, sehingga timbul masalah-masalah di lapangan, seperti illegal logging dan sebagainya. Ini semua harus kita fahami dan ketahui. Tidak mungkin kita dapat melak-



sanakan tugas dengan baik, tanpa memahami masalah-masalah yang bisa muncul dari berbagai aspek tadi.

Bidang ekonomi juga kita melihat bagaimana dampak kenaikan harga minyak mentah dunia, yang secara signifikan melonjak. Tentunya berbagai hal yang membuat melonjak harga minyak ini jadi naik, badai Katrina yang berada di daratan Barat, dan juga masalah-masalah lain, berkembangnya Industri dengan pesat di beberapa negara yang mengkonsumsi BBM yang cukup banyak, tentu membuat harga BBM semakin melonjak, dampaknya dalam negeri sangat terasa sekali.

Karena pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat, yang eronisnya subsidi tersebut banyak dimanfaatkan oleh kelompok menengah keatas bukan oleh rakyat kecil, oleh karena itu tentunya perlu solusi yang terbaik dan jangan sampai subsidi tersebut tidak sampai sasaran.

Menghadapi kenaikan BBM pun kita mengalami gelombang-gelombang unjuk rasa yang cukup berat di semua daerah. Namun kita bersyukur tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, tentu semuanya ini berkat kesiapan dari pada aparat yang ada di seluruh wilayah. Kalau kita lihat perkembangan di bidang sosial budaya, banyak hal juga yang kita alami bagaimana bangsa Indonesia yang terkenal ramah, dikenal memegang teguh adat istiadat, menghargai nilai-nilai yang luhur, tapi semuanya itu mengalami erosi, masyarakat gampang berbuat hal-hal yang sifatnya keras, bringas, nekad dan sebagainya, sehingga banyak terjadi benturan-benturan di lapangan antar masyarakat sendiri. Kondisi ini juga tentunya tidak bisa kita biarkan, pantas kita tangani secara arif, tidak bisa oleh Polisi saja, tetapi lintas Departemen termasuk juga tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Untuk bisa ditangani

dengan baik, masalah lain yang kita tangani di bidang agama, kita menghadapi kerawanan-kerawanan potensi konflik yang terjadi intern agama. Contoh misalnya, aliran Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lainnya, yang ini masih merupakan bara dalam sekam yang bisa sewaktu-waktu bisa terjadi lagi yang tentunya hal ini bisa diantisipasi baik oleh semua wilayah, jangan sampai masalah internal agama Islam menjadi muncul kembali. Jawa Barat merupakan konsentrasi besar bagi umat Ahmadiyah yang ada di Kuningan, Indramayu, Bogor dan sebagainya. Tentunya memerlukan perhatian yang cukup serius dari kita semua. Juga potensi konflik antara agama, inipun masih merupakan kerawanan di negara kita ini. Bagaimana dari kelompok-kelompok masyarakat mensikapi SKB. Ada yang memandang SKB ini sudah tidak perlu, cabut lagi dan sebagainya, tetapi yang penting bagi kita adalah mencegah jangan sampai kerawanan-kerawanan tadi muncul menjadi gangguan-gangguan keamanan, tentunya ini tugas bersama kita untuk menanganinya dengan baik.

Dibidang keamanan kita melihat konflik-konflik yang kita alami. Konflik horisontal yang terjadi di Ambon kita bersyukur sudah kondusif, berangsur-angsur menjadi baik, demikian juga di Poso, sekarang kita bersyukur tidak ada lagi konflik antar kelompok. Yang ada adalah tindakan-tindakan terror yang sifatnya adalah sasaran perorangan. Kita bersyukur karena sudah bisa mengidentifikasi, menganatomi, jaringan pelakunya sudah kita ketahui. Beberapa pelaku sudah berhasil ditangkap, tentunya tinggal yang lain-lainnya diupayakan bisa terungkap semuanya. Utang kita menangkap Noordin M Top, selagi Noordin M Top belum bisa tertangkap, tentunya kita belum bisa tenang, karena itu tim anti terror masih tetap ada di lapangan mengupayakan agar Noordin M

Top tentunya bisa secepatnya ditangkap. Permasalahan, ancaman, tantangan yang kita hadapi pada masa-masa yang lalu. Kita bersyukur bisa kelola dengan baik, sehingga situasi keamanan bisa berangsur-angsur menjadi kondusif. Kita bersyukur juga, bahwa beberapa keberhasilan kita peroleh, mulai dari penanganan masalah terror, masalah Narkoba, masalah para debitur yang lari ke luar negeri, masalah tindakan korupsi di berbagai Departemen, kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa kita ungkap, tentu semuanya ini adalah kontribusi dari pada wilayah-wilayah termasuk juga Jawa Barat dan sekarang sedang menangani kasus yang cukup menjadi perhatian nasional yaitu masalah Telkom.

Masalah Politik, sebagai Polisi kita harus mengetahui potensi-potensi kerawanan yang muncul dari kegiatan-kegiatan politik, seperti Pilkada, Otonomi Daerah, internal partai, konflik dan sebagainya harus Saudara fahami. Tapi disini tidak berarti bahwa Polri bermain Politik. Apalagi Polri bermain terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu saya minta intelijen Polri adalah intelijen kriminal, bukan spion, seperti CIA maupun lain-lainnya. Tugas kita tidak seperti itu. Tapi dalam rangka kita bisa mengidentifikasi secara dini, permasalahan-permasalahan yang muncul, di tiap aspek kehidupan nasional, sehingga bisa secara cepat, melakukan antisipasi mencegah jangan sampai menjadi gangguan keamanan, itu saja tugas Polri, tidak mencampuri bagaimana kegiatan politik, bagaimana kegiatan masing-masing partai politik, aktivitas mereka kita tidak mencampuri hal-hal seperti itu. Yang dijaga adalah jangan sampai terjadi benturan-benturan permasalahan-permasalahan yang dampaknya tentu mengganggu keamanan, merugikan berbagai kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat serah terima jabatan Kapolri

terdahulu pernah disampaikan bahwa setiap anggota Polri wajib mengetahui masalah politik, tapi tidak terlibat dalam kegiatan politik, apalagi terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Sangat rugi Polisi sebagai alat negara penegak hukum, kalau sampai terlibat pada kegiatan-kegiatan politik sebagai alat kekuasaan, bisa diintervensi rugi sekali kita. Posisi Polri sudah lebih di atas, kalau kita menempatkan diri sebagai alat kekuasaan, berarti kita menurunkan posisi Polri. Kita memunculkan masalah-masalah baru, tantangan-tantangan baru, bahkan bisa memunculkan lawan-lawan baru. Itu sangat salah sekali. Saya sangat minta benar-benar kepada Saudara termasuk kepada pejabat utama Mabes Polri, untuk benar-benar bisa menyampaikan ini, dengan baik kebawah dan bawahanpun bisa menterjemahkan dengan baik. Paradigma lama jangan digunakan lagi. Tekankan ke bawah jangan sampai salah taksir. Sementara pihak yang belum bisa juga mengetahui bagaimana sebenarnya Polri saat ini, inipun saya minta bisa disosialisasikan keluar juga. Polri sampai kapanpun tidak akan menjadi alat politik dan alat kekuasaan. Siapapun pemerintahannya Polisi harus tetap eksis tentunya. Jangan sampai Polri bisa diintervensi oleh siapapun, oleh partai politik oleh kekuasaan. Siapapun berkuasa Polri tidak bisa diintervensi, DPR, Presiden, Wakil Presiden dan lainnya tidak bisa. Polri harus independent, kalau sampai ada Perwira misalnya karena jabatan, mendekat kepada salah satu partai politik, itu adalah satu penghianatan. Saya pesankan kepada seluruh anggota Polri supaya kita profesional, saya tidak ingin anggota Polri monoloyalitas ganda pada pihak-pihak lain, loyalitas Saudara juga bukan kepada saya Kapolri, tetapi kepada institusi, pada hukum, pada bangsa dan Negara.

Dalam bidang penegakan hukum, saya minta penegakan

hukum lakukan secara tegas, obyektif, transparan dan menjamin rasa keadilan tidak cukup dengan tegas saja, tidak cukup dengan konsisten saja, tetapi rasa keadilan juga harus kita wujudkan. Jangan sampai kita seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi tidak merasa keadilan. Hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan rasa keadilan.

Adil tentunya adalah yang dirasakan masyarakat, bukan oleh jajaran aparat, bukan oleh penguasa dan bukan pula oleh partai politik dan lain sebagainya. Dengan bisa menegakkan hukum secara obyektif, transparan, tegas menjamin rasa keadilan pasti akan muncul adanya kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang didambakan oleh masyarakat.

**Dengan bisa menegakkan hukum secara obyektif, transparan, tegas menjamin rasa keadilan pasti akan muncul adanya kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang didambakan oleh masyarakat.**

Bukan saja masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat luar negeri, masyarakat luar negeri meminta kepastian hukum dalam bidang usaha, dengan kepastian hukum bisa membuat jera para pelanggar hukum.

Negara demokrasi tentu memerlukan hukum yang kuat. Demokrasi tidak bisa tegak, tanpa adanya hukum yang kuat, dalam arti menjamin rasa keadilan. Demokrasi dan hukum ibarat dua sisi mata uang. Didalam negara demokrasi Polisi harus kuat. Kuat dalam arti profesional melaksanakan tugas dengan ketentuan yang ditetapkan, bukan kuat dalam arti kekuasaan. Penegakan hukum selain menjamin adanya penegakan hu-

kum tentunya diharapkan bahwa dengan penegakan hukum juga bisa mengamankan kekayaan negara, bisa mengamankan pemasukan negara dengan baik. Tugas Polri tidak semata-mata sebagai pemadam kebakaran hanya reaktif saja. Ada kasus tangani, ada kecelakaan tangani. Tapi kita juga punya misi. Kita masih ingat doktrin yang telah dicanangkan oleh pendahulu Polri.

**Toto tentrem karto raharjo**, toto tentrem artinya adalah **suatu keamanan ketertiban masyarakat yang baik**. Karto raharjo adalah **kesejahteraan**. Tugas Polri penegakan hukum harus berorientasi kesana. Jadi Polri harus punya konsep dalam tugasnya, tidak hanya mendadak-mendadak saja, seperti yang digambarkan **Pemadam kebakaran** tadi. Peran Polisi saat ini adalah menjamin eksistensi keberadaan Negara Indonesia. Karena itu dalam penegakan hukum saya minta prioritas penanganan mengamankan Negara. Polri ikut menertibkan instansi-instansi yang menjadi sumber-sumber pemasukan negara seperti Bea Cukai, Perpajakan, Imigrasi dan BUMN serta lain-lainnya. Jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Kita yakin kalau hukum berjalan dengan baik, Departemen-departemen tadi bisa kita bantu untuk disiplin, pasti pemasukan keuangan negara akan meningkat. APBN akan meningkat, kalau APBN meningkat, berarti sumber pembiayaan untuk pembangunan akan meningkat. Pembangunan meningkat berarti lapangan kerja akan meningkat. Lapangan kerja meningkat berarti kesejahteraan rakyat akan meningkat juga. Kita harapkan kedepan nanti kondisi masyarakat kesejahteraan semakin baik. Ini bisa dilaksanakan bila ada komitmen dan konsep yang jelas dari kita semua. Yang ketiga tentunya kita bisa memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan kepada masyarakat dengan baik. Tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang menyakitkan masyarakat, cegah adanya penyimpangan-penyimpangan.\*\*\*

DALAM agenda nasional yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, ada tiga hal kejahatan yakni **korupsi, kejahatan terorisme dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba**. Tiga hal tersebut akan kita tangani secara simultan, karena akan mengancam keselamatan masyarakat dan Bangsa bahkan akan mengancam eksistensi Negara. Oleh karena itu sangat diperlukan keseriusan semua pihak dalam menangani masalah tersebut, demikian antara lain yang disampaikan Ketua BNN Jenderal Polisi Sutanto dalam amanat pembukaan Rakor BNN, BNP dan BNKab/Kota di Hotel Sahid, Jakarta.

Lebih jauh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto selaku Ketua BNN mengatakan bahwa dari pertemuan ini, bisa memperoleh solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di daerah dan akan peroleh pembekalan dari beberapa pejabat yang hadir dalam forum tersebut. "Selain itu, kita bisa merumuskan langkah-langkah konkret kita dalam rangka lebih efektif untuk pencegahan, pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba," papar Kapolri di hadapan pejabat utama Mabes Polri, perwakilan badan dunia, Gubernur DKI Jakarta, Menpan, Mendagri, Menko Kesra, Ketua Komisi III DPRRI, Ketua BNP, BNKab/Kota, pimpinan LSM, pejabat BNN dan staf. BNN.

Menurut Ketua BNN, masalah Narkoba kita aktifkan dengan berbagai upaya dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan. Dikemukakan pula, korupsi menggerogoti kemampuan penganggaran negara baik sumber-sumber penghasilan yang masuk maupun penggunaan anggaran itu sendiri. Tentunya, akan disayangkan kalau kita tidak bisa memberantasnya. Terorisme, lanjut Kapolri, dampaknya selain menimbulkan korban jiwa, juga gangguan keamanan, ketidaktenangan bagi warga masyarakat dan berdampak pada masalah-masalah lain, seperti ekonomi. Terpuruknya ekonomi kita, saat terjadinya Bom Bali I dan bom Bali II, kini turis yang berkunjung ke Indonesia menurun drastis. "Tidak ada 50 persen, jika dibandingkan waktu-waktu sebelumnya," paparnya. Narkoba, bagaimana membahayakan, mengancam bagi generasi muda yang menjadi harapan Bangsa di masa mendatang. "Kalau kita amati perkembangannya, dari tahun 2001 -



Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto:

## Dibutuhkan Secara All Out dari Semua Pihak dalam Pemberantasan Narkoba

2005 bukannya semakin menurun tapi malahan kian meningkat. Diperkirakan tahun 2001 kasus-kasus yang terjadi berkisar antara 3.600 lebih tapi pada dekade tahun 2005 mencapai hampir 15.000 kasus. Pelakunya pun meningkat dari 5.000 dan di tahun 2005 mencapai 20.000-an lebih. Jumlah kasus atau tersangka mengalami kenaikan sekitar 20 persen," kata Kapolri menjelaskan.

### Telah merambah

Saat ini, kata Ketua BNN, tidak ada satupun wilayah yang terbebas dari Narkoba. Pada dekade tahun 1970-an atau 1980-an hanya terjadi di kota-kota besar, utamanya Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya. Kini, sudah merambah semua wilayah di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia semua kabupaten di Indonesia, tidak ada yang terbebas dari Narkoba. Ia menambahkan, umur mereka yang mengonsumsi Narkoba ini sangat memprihatinkan. "Kalau dulu, kelompok remaja (SMA, SLTP), sekarang bahkan anak SD pun sudah coba-coba mengonsumsi Narkoba tersebut. Mungkin, karena mereka melihat

bagaimana kakak-kakaknya menggunakan Narkoba tersebut," ia memberikan ilustrasi.

### Merambah rakyat jelata

Dulu yang terkena Narkoba adalah kelompok menengah ke atas, lanjutnya, karena mampu membeli Narkoba. Kini, sudah merambah ke rakyat jelata, contohnya Kampung Bali di Jakarta., tiap malam para korban Narkoba bergelimpangan, telor bahkan ada yang meninggal dan tempat-tempat lain juga demikian. Itu mungkin strategi, para pengedar Narkoba yang beredar di tengah lapisan menengah keatas, peredarannya tidak sepesat seperti sekarang ini. Alasannya, kata Kapolri, penyebabnya antara lain karena kalau yang terkena seperti pecandu dari kelompok tak mampu. Ada kemungkinan yang dilakukan oleh keluarga kelas bawah, bisa dengan cara bertindak kriminal dan untuk bisa peroleh satu linting/butir, dia menjadi pengedar serta menjual 5-6 butir dan peroleh keuntungan, akhirnya bisa beli salah satu dua butir untuk dikonsumsi sendiri.

Dengan kecenderungan masyarakat seperti itu, kata Kapolri, selain sebagai pelaku, pecandu dan pengedar, perkembangannya akan sema-

kin pesat. Sehingga akan muncul pengedar-pengedar baru dan korban-korban baru dari kelompok masyarakat bawah. "Sehingga tidak heran kalau sekarang semua wilayah di Indonesia ini, tidak ada yang terbebas dari masalah Narkoba," ujarnya prihatin.

**Melibatkan sindikat**

Hal ini yang kita hadapi saat saat ini, kata Ketua BNN dan tentunya menjadi masalah kita untuk mencermati dengan baik. "Dan ini, bukan hanya masalah Indonesia saja, tapi masalah dunia. Karena di dunia saat ini, tidak ada negara yang terbebas dari Narkoba", karena bisnis ini menggirkan, ujar Sutanto, melibatkan sindikat internasional tanpa mengenal Negara. Seperti kasus yang beberapa waktu lalu, diungkap ada dari Perancis, Cina, Belanda, bahkan Indonesia kini menjadi tujuan, dulunya hanya tempat transit tetapi sekarang sudah tergolong sebagai negara produsen Narkoba.

Kalau kita melihat, upaya yang kita lakukan dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba telah banyak kegiatan yang telah kita lakukan. Salah satunya, upaya penegakan hukum dengan mengungkap banyak kasus pabrik ekstasi. Sosialisasi banyak pula dilakukan dan masyarakatpun semakin peduli melalui TV, seminar. Namun, upaya penegakan hukum, pencegahannya, rehabilitasi belum bisa menekan penyalahgunaan.

**Rumuskan langkah konkrit**

Kapolri berharap dari Rakor ini, bisa dirumuskan secara sinergis di lapangan langkah konkrit, untuk bisa mencegah, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Kalau upaya-upaya ini, hanya dilakukan oleh pemerintah, BNN, BNP dan BNK tanpa didukung oleh masyarakat maka tidak mungkin akan berhasil. "Berarti dibutuhkan keterlibatan secara all out dari semua pihak lembaga pemerintah, BNN, BNP dan BNK serta komponen masyarakat. Inilah tugas kita semua untuk bisa mendinamisir, membangkitkan semua komponen Bangsa melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Kalakhir BNN Komisaris Jenderal Polisi Made Mangku Pastika dalam laporan pembukaan Rakor BNN, BNP dan BNKab/Kota di Hotal

Sahid, Jakarta. Mengatakan Saat ini telah terjadi peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pada lingkup global, regional maupun nasional, sehingga menjadi ancaman yang cukup serius terhadap aspek-aspek kehidupan perseorangan, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Untuk itu lanjut Kalakhir BNN kegiatan Rakor kali ini, dimaksudkan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi dari segenap pejabat BNN, BNP dan BNK Kab/Kota dalam melaksanakan program P4GN yang efektif dan efisien baik dalam skala

**"Kalau dulu, kelompok remaja (SMA, SLTP), sekarang bahkan anak SD pun sudah coba-coba mengonsumsi Narkoba tersebut. Mungkin, karena mereka melihat bagaimana kakak-kakaknya menggunakan Narkoba tersebut,"**

nasional maupun daerah. Menurut Kalakhir BNN, situasi Narkoba secara nasional semakin kompleks yang menjadikan persoalan pelik yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita semakin panjang karena selain berhadapan dengan ancaman masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba juga diperparah oleh penularan HIV/AIDS di kalangan pengguna Narkoba melalui jarum suntik.

Dalam Rakor kali ini akan dibahas beberapa masalah penting dengan menghadirkan pembicara dari Mendagri, "Status Kelembagaan BNP dan BN Kab/Kota Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Yang Dapat Mendukung Implementasi Program P4GN", Menpan, "Status Penempatan Sumber Daya Manusia Dalam Struktur Organisasi BNP dan BNKab/Kota Yang Dapat Mendukung Implementasi Program P4GN", Ketua Komisi III DPR RI "Peranan Dan Dukungan DPRRI Dalam Menang-

gulasi Permasalahan Narkoba di Indonesia", Ketua KPA "Dampak Ikutan Akibat Penyalahgunaan Narkoba (Penularan Virus HIV dan Kerjasama KPA - BNN Dalam Rangka Menanggulangi Prevelensi Virus HIV/AIDS", Kalakhir BNN "Laporan Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)", Ketua BNP DKI Jakarta "Laporan Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah DKI Jakarta (Best Practicice)", dan Sekretaris Lakhir BNN "Revisi Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 2002 Tentang Kelembagaan Badan Narkotika Nasional".

Terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang bersifat kompleks dan multidimensional, maka diperlukan pendekatan terpadu, komprehensif, multidisiplin, peran aktif masyarakat, komitmen yang kuat serta kerjasama internasional untuk mengatasinya yang dapat kita diskusikan bersama dalam forum Rakor. Peningkatan masalah Narkoba ini, tampak dari implementasi bidang penegakan hukum yang bersifat kuantitatif, jumlah kasus, jumlah tersangka dan jumlah barang bukti serta meningkatnya proporsi tahanan dan narapidana Narkoba di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang telah melampaui angka rata-rata 21 persen dari jumlah seluruh tahanan dan narapidana, di kota-kota besar angka tersebut telah mencapai 60 persen.

Dalam Rakor ini, Kalakhir BNN mengajak untuk menyatukan semangat memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Republik yang kita cintai ini. Perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba semakin meningkat. Padahal, Bangsa dan Negara sedang berusaha keras untuk keluar dari berbagai krisis yang hingga kini masih membelit Bangsa dan Negara ini.

Pada Rakor kali ini, dihadiri oleh 670 orang undangan yang terdiri dari: Anggota BNN dan *liason officer* (LO) 25 instansi terkait, BNP dan BNKKab/Kota (31 provinsi, 213 kabupaten dan 57 kota), konsultan BNN dan 17 organisasi internasional dan beberapa LSM. Dalam acara ini, mengusung tema: "Negara Tidak Boleh Kalah Melawan Narkoba". \*\*\*

# Jade Sistem Suatu Alternatif Menuju Keberhasilan Tugas Polri

TUNTUTAN dan kebutuhan Polri terhadap teknologi informasi, merupakan suatu hal yang tidak dapat dirawar lagi. Keberadaan TNCC merupakan wujud nyata yang akan diberdayakan guna mendukung keberhasilan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan memanfaatkan program Jade System. Pernyataan tersebut, disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto yang di dampingi Mr. Mick Keelty selaku Kepala Kepolisian Federal Australia (Commissioner AFP), pada peresmian Kantor Transnasional Crime Coordination Centre (TNCC) Biro Analis Bareskrim Polri Lantai 12 Gedung TNCC di Mabes Polri, Jakarta.

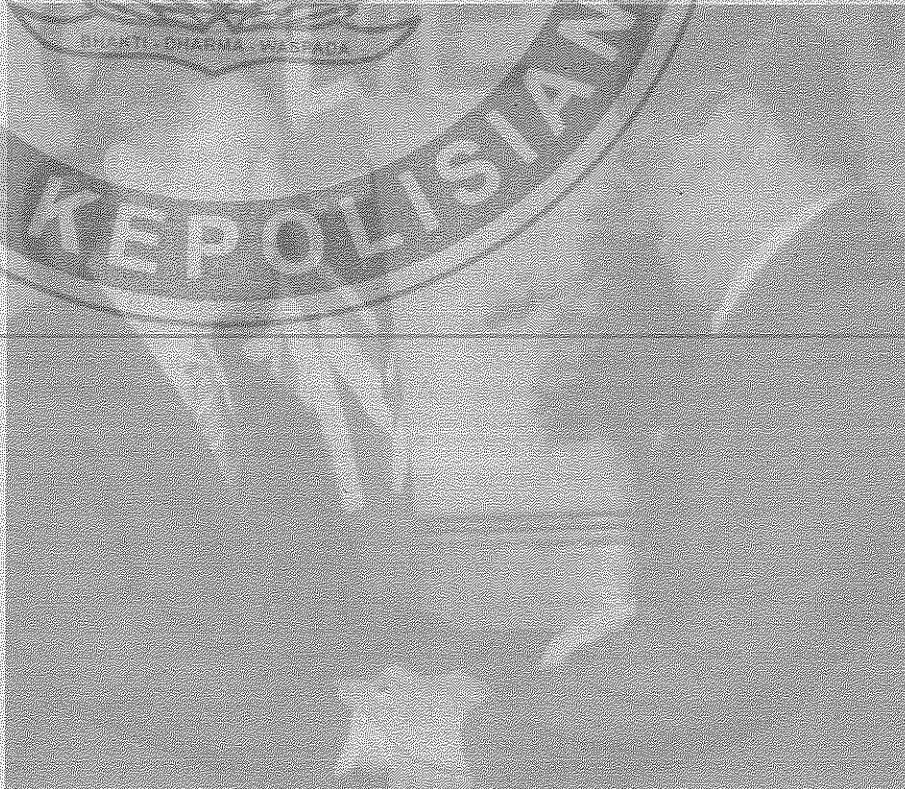
Lebih jauh Kapolri mengatakan upaya mendukung kinerja Polri, kebutuhan akan teknologi informasi menjadi bagian hal penting dan tak bisa ditawar lagi. Untuk itu, TNCC menjadi pilihan guna upaya membantu tugas penyelidikan dan penyidikan. Peralatan teknologi internasional yang memiliki kemampuan dengan program CMIS dan CETS. Peralatan dengan sistem aplikasi, menggunakan "Case Management Intelligent System (CMICY)" sudah ada di Polda-Polda dan Polwil Surakarta. TNCC memiliki kemampuan dan program CETS (Child Exploitations Tracking System) yang akan dilaksanakan di enam Polda yaitu: Polda Sumatera Utara (Sumut), Kepri (Batam), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Jawa Timur (Jatim) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, didukung dengan JCLEC (Jakarta Centre Law Enforcement Cooperations) di Semarang dan Platina (Pusat Pelatihan Anti Teror Nasional) di Pusdik Reserse Mega-

mendung Bogor. "Dengan kehadiran Transnasional Crime Coordination Centre (TNCC) yang merupakan pengembangan struktur baru untuk menjawab tantangan dan kebutuhan kedepan, yang secara struktural keberadaannya di bawah Bareskrim Polri," kata Kapolri di hadapan pejabat utama Mabes Polri dan tamu undangan lain yang turut menyaksikan peresmian Kantor TNCC dan sekretariat JCLEC Mabes Polri.

Historis terwujudnya TNCC Polri, papar Sutanto, diawali dengan pemikiran berbagai pihak. Salah satunya, pihak AFP dalam membantu Polri memerangi kejahatan internasional. Keberhasilan Polri mengungkap kasus teror bom Bali, JW Marriot Hotel, Kedutaan Besar Australia dan terungkapnya kegiatan Pabrik Ekstasi di Tange-

rang yang merupakan jaringan narkoba terbesar ke-3 di dunia. "Keberhasilan Polri dalam tugas-tugas tersebut, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan negara sahabat, seperti Amerika Serikat dan AFP di bidang informasi dan teknologi," ungkapnya.

Dikemukakan pula, TNCC memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan data kejahatan transnasional dan menyalurkan kepada unit-unit tim investigasi kriminal nasional maupun internasional/lintas negara termasuk pelatihan/proyek-proyek pembelajaran dan pengembangan konsep-konsep baru maupun metodologi serta menciptakan jaringan kerja, baik nasional maupun internasional. TNCC ini memiliki delapan kemampuan analisa yaitu: *terrorism, narcotic, people smuggling,*



Kapolri, Jenderal Polisi Sutanto (Kanan), berjabat tangan dengan Kepala Australia Federal Police, Mick Keelty APM, usai meresmikan Gedung Trans National Crime Center (TNCC) di Mabes Polri.



*money loundring, sea piracy, arm smuggling, cyber crime dan international economic of crime.*

Organisasi TNCC, kata mantan Kapolda Jawa Timur itu, merupakan sub organisasi sebagai pelaksana staf di Bareskrim Polri, untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan, memberi masukan kepada pimpinan tentang upaya penegakan hukum nasional dan internasional serta pelayanan bagi kegiatan investigasi kejahatan lintas Negara. Dampaknya, terhadap kepentingan Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk digunakan

sebagai rujukan-rujukan terhadap isu-isu kejahatan lintas Negara, serta memberikan arah, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tim penindak, dari Polri baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, kata Sutanto, mengatur kerjasama dengan organisasi-

**TNCC memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan data kejahatan transnasional dan menyalurkan kepada unit-unit tim investigasi kriminal nasional maupun internasional/lintas negara termasuk pelatihan/proyek-proyek pembelajaran dan pengembangan konsep-konsep baru maupun metodologi serta menciptakan jaringan kerja, baik nasional maupun internasional.**



Kapolri, Jenderal Polisi Sutanto (Kiri), bersama Kepala Australia Federal Police, Mick Keelty APM, saat menandatangani diresmikannya Gedung Trans National Crime Center (TNCC) di Mabes Polri.

organisasi penegak hukum, baik nasional maupun internasional untuk berbagai informasi dan investigasi oleh multiinstansi serta memberikan *advice* dan koordinasi, baik mengenai pelatihan dan tindakan teknis dalam penegakan hukum internasional untuk memerangi kejahatan lintas negara. Lalu, menyediakan analisa informasi mengenai kejahatan yang bersifat lintas negara dan menyediakan hubungan interkoneksi dengan 31 provinsi di Indonesia dan negara tetangga yang telah memiliki TNCC (Seperti Thailand, Philipina dan Fuji).

Awalnya, kantor TNCC berada di lantai 3, Gedung Interpol dan sudah diresmikan oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Dai Bachtiar, SH. 2 Juli 2004 lalu. Untuk kelengkapan peralatan teknologi informasi dibantu pihak AFP sebagai bagian dari program kerja sama yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu, kata Kapolri. Untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan Polri, menurut Kapolri, utamanya pihak AFP maupun ICITAP sebagai negara donor, maka kita serius dengan memfokuskan beberapa hal penting. Polri akan tetap

konsisten dalam memberdayakan dan memelihara semua kemampuan yang dimiliki TNCC baik di Mabes Polri maupun yang tergelar di 31 Polda, Pusdik Reserse Mega Mendung dan di Pusdik Intelijen Soreang Bandung. Kemudian, untuk pemberdayaan TNCC, Polri akan mencukupi kebutuhan personil yang profesional, untuk mengawakinya dan didukung dengan dana operasional yang memadai, termasuk dana pelatihan maupun supervisi teknis. Selanjutnya, untuk kemampuan TNCC, akan kita manfaatkan dan digelar di Baintelkam Polri maupun instansi terkait dalam penanganan *transnasional crime*

dan perlu penyempurnaan organisasi TNCC demi efektifitas serta efesiensi dalam pencapaian tugas pokok TNCC.

Dijelaskan pula, bahwa Polri dan AFP, 30 Januari, 1 Februari 2006 telah melakukan kegiatan Steering Committee Meeting TNCC dan MoU Working Group Meeting, yang menghasilkan lima kesepakatan kerja sama sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan TNCC di masa mendatang, serta kesepakatan dalam memerangi kejahatan transnasional yang menjadi isu menonjol. "Kerjasama yang sudah dilakukan selama ini, telah membawa hasil yang cukup berarti bagi Polri dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi". Pada kesempatan tersebut, Kapolri mengucapkan terima kasih kepada Mr. Mick Keelty yang telah banyak memberikan bantuan pemikiran, menjembatani kepentingan Polri dengan para donor dan telah memberikan bantuan pelatihan-pelatihan, sampai terwujudnya TNCC ini. "Hubungan kerja sama ini dapat berlanjut dimasa-masa mendatang," ucapnya mengakhiri sambutan. \*\*\*

Kapolri : Raker Polri 2006

## Polri Terima Hibah dari Pemerintah Jepang Berupa Peralatan Penunjang Operasional di Lapangan

TIDAK berlebihan kalau bantuan yang diberikan adalah karena adanya suatu komitmen dan implementasi yang sama antara Pemerintah Jepang dan Polri dalam upaya mewujudkan pelayanan keamanan yang demokratis, mampu menunjukkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia serta menegakkan supremasi hukum. Demikian antara lain amanat Kapolri ketika menerima bantuan peralatan dalam menunjang tugas operasional Polri di lapangan.

Lebih jauh Kapolri mengatakan, penerimaan peralatan melalui hibah pertama pemerintah Jepang merupakan suatu wujud yang serius dari pemerintah Jepang untuk membantu upaya Polri dalam memenuhi peralatan operasional di lapangan, agar tugas-tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat memenuhi aspirasi masyarakat demokratis.

Kepada pemerintah Jepang khususnya selaku pimpinan Polri menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan peralatan identifikasi untuk Polres Bekasi Polda Metro Jaya, Polres Cimahi Polda Jawa Barat, Polres Kendal Polda Jawa Tengah, Polres Sidoarjo Polda Jawa Timur. Selain itu juga diterima berupa peralatan Deteksi untuk Direktorat Narkoba Bareskrim

Polri, peralatan komunikasi untuk mobil Patroli Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya, dan peralatan lainnya untuk mendukung pembentukan Perpolisian Masyarakat termasuk pelatihan-pelatihan penggunaan peralatannya.

Pada kesempatan yang sama juga diterima berupa kendaraan Roda 2 sebanyak 2.500 buah dari



5000 yang direncanakan ke Polda-Polda yang berasal dari anggaran APBN Polri. Bantuan kali ini bukanlah bantuan yang pertama kali diterima, karena sebelumnya Polri pernah menerima berbagai bantuan dari Pemerintah Jepang.

Tidak berlebihan kalau bantuan yang diberikan adalah, karena adanya suatu komitmen dan implementasi yang sama antara Pemerintah Jepang dan Polri dalam upaya mewujudkan pelayanan keamanan yang demokratis, mampu menunjukkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, serta menegakkan supremasi hukum. Untuk pencapaian hal itu masih memerlukan

waktu yang panjang dan memerlukan berbagai peralatan-peralatan lain, oleh karena pengadaaan peralatan-peralatan tersebut tidak mungkin terpenuhi dan terbiayai oleh APBN Polri, maka bantuan pemerintah Jepang tetap diharapkan.

Kepada pejabat yang mengoperasikan peralatan ini Kapolri berpesan agar peralatan tersebut dapat digunakan secara profesional sehingga mampu mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing secara optimal, oleh karena itu Kapolri mengharapkan perhatian serius dalam penanganan dan penggunaan peralatan-peralatan tersebut serta pembentukan peralatan tidak dirubah-rubah peruntukannya.

Mengakhiri amanatnya Kapolri selaku pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Jepang atas bantuan dan kerjasama yang berjalan selama ini, mudah-mudahan kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat ditingkatkan serta dikembangkan pada masa-masa mendatang. Kepada Duta Besar Pemerintah Jepang yang akan meninggalkan Indonesia, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dan Kapolri mengharapkan dapat mencarikan penggantinya yang dapat meneruskan kerjasama ini.\*\*\*

# Munas II Persatuan Purnawirawan Polri Dihadiri Presiden

DARI sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah saat ini terlihat tanda bahwa Indonesia tengah menuju kearah yang benar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta pemakluman mengenai upaya dan hasil yang dicapai pemerintah yang dipimpinnya dalam menghadapi dan menyelesaikan sejumlah permasalahan bangsa. Demikian antara lain yang dikemukakan Presiden saat membuka Munas Persatuan Purnawirawan Polri di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Presiden lebih jauh mengatakan bahwa masih segar dalam ingatan kita bahwa negara kita mengalami krisis dahsyat dan dalam, karena terjadi perubahan politik mendasar dengan lengsernya Pak Harto. Ekonomi nasional mengalami krisis dan akhirnya melebar dan meluas menjadi krisis nasional. Kita ingat bahwa suasana tahun 1998-1999 dan 2000-2001, ekor (dampaknya) masih kita rasakan hingga sekarang. Akan tetapi kita bersyukur bahwa semua tantangan cobaan dinamika dan romantika itu bisa kita lewati. Mengenai kritik, dikemukakan Presiden dalam negara demokrasi hal itu diberi ruang. Presiden mengaku mendengar kritik dan banyak pihak termasuk dari seniornya. Presiden tidak menjawab semua kritik yang ditujukan kepada pemerintah, oleh karena kritik yang disampaikan masalahnya baru sedang diproses dan diperjuangkan. Kritik yang sifatnya berupa masukan yang belum terpikirkan akan segera dijalankan dan direalisasikan.

Menanggapi apa yang dike-



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pada acara Munas II PPPolri.

mukakan pengamat Politik dari LIPI Ikras Nusa Bakti, berharap mengurangi menyampaikan pemakluman dari rakyatnya. Sosiolog dari UI, Tamrin A Tamagola menilai pemakluman yang dimaksudkan Presiden itu kerap disampaikan karena ada keceemasan. Tamrin mengemukakan memang ada kemajuan di bidang keamanan, seperti terselesaikannya masalah Aceh. Namun untuk masalah keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari yang dijanjikan. Untuk tahun pertama pemakluman itu dapat kita maklumi.

Tetapi kalau tahun-tahun kedua dan seterusnya masih berkuat pada pemakluman itu menunjukkan tim pemerintah

lemah.

Demikian juga pengamat politik Universitas Gajah Mada Riswanda Himawan, mengemukakan berulangnya muncul pemakluman merupakan pertanda adanya jalan buntu dan tidak mempunyai jawaban atas masalah yang dihadapi Bangsa. Repotnya, ketika berada di jalan buntu yang ada didekatnya yang dikira teman ternyata lawan. Para penasehat juga tidak mampu memberi solusi dan tampaknya tidak lagi mau berdebat dengan Presiden memberi cara pandang lain. Riswanda mengemukakan untuk solusi atas masalah Bangsa, Presiden harus berani mendekati lawan-lawan politiknya.\*\*\*

# Penindakan Terhadap Penyimpangan/ Pelanggaran oleh Anggota Tidak Membedakan Pangkat dan Golongan

HARAPAN masyarakat terhadap Polri adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dimana tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002.

Harapan masyarakat tersebut tidak akan berjalan dengan baik, bilamana pelanggaran banyak dilakukan oleh anggota serta pelanggaran yang dilakukan tersebut tidak diberikan sanksi sebagaimana peraturan/hukum yang berlaku.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : STR/96/II/2006 tanggal 15-2-2006, perbandingan data pelanggaran pada tahun 2004 dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut : pelanggaran disiplin = Pati naik 1 pelaku, Pamen naik 28 pelaku, Pama naik 3 pelaku, Ba turun 774 pelaku, Ta turun 10 pelaku, dan PNS turun 29 pelaku; pelanggaran ketertiban = Pamen naik 22 pelaku, Pama turun 65 pelaku, Ba turun 3260 pelaku, Ta turun 727 pelaku dan PNS turun 417 pelaku; pelanggaran pidana = Pati naik 5 pelaku, Pamen turun 15 pelaku, Pama turun 23 pelaku, Ba turun 82 pelaku, Ta turun 172 pelaku dan PNS naik 2 pelaku.

Berdasarkan data tersebut di atas, Polri telah menindak lanjuti dengan penertiban kedalam tubuh Polri melalui penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan/pelanggaran dengan tidak membedakan pangkat dan golongan.

Dalam upaya meminimalkan terjadinya pelanggaran oleh anggota, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. Bidang Pengamanan Personil :

1. Melaksanakan pembinaan secara periodik kepada seluruh anggota agar tidak terjebak pada tindakan pelanggaran hukum dan etika profesi Polri termasuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anggota sesuai dengan ketentuan.
2. Mengadakan pengawasan terhadap anggota untuk tidak terlibat kasus Narkoba baik sebagai pengedar, pengguna maupun sebagai beking serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus-kasus Narkoba.
3. Melakukan lidik, inventarisasi dan pembinaan terhadap anggota maupun keluarganya yang terindikasi terlibat dengan kelompok ekstrim/radikal tertentu.
4. Memberikan kesempatan kepada anggota mengembangkan kariernya dengan mengikuti pendidikan kedinasan maupun pendidikan di luar kedinasan.
5. Mutasi personil, penentuan untuk menduduki jabatan tertentu dan kesempatan mengikuti pendidikan pengembangan dilakukan sesuai kebutuhan orang dan pengembangan karier melalui mekanisme Wanjak dan seleksi yang obyektif serta bertanggung jawab.
6. Mengoptimalkan lembaga sidang disiplin dan sidang KKE guna menjamin kepastian hukum dan catatan personil/kondite.
7. Pemberian penghargaan dan sanksi dilakukan secara konsisten, konsekuen, obyektif dan adil tanpa memandang pangkat dan jabatan.

B. Bidang pengamanan material:

1. Mempedomani dan melengkapi

peralatan Sispam dan Perlindungan Markas terhadap serangan dari luar, bencana alam maupun akibat kelalaian.

2. Setiap melaksanakan pengadaan materil Polri agar mempedomani Keppres maupun Skep Kapolri, sehingga tidak terjadi penyimpangan (Mark up, Korupsi dan Pengadaan fiktif).
3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, penyimpanan dan pengamanan Senpi organik guna mencegah penyalahgunaan, merusak dan menghilangkan Senpi.
4. Pemeriksaan terhadap alat-alat angkutan darat, laut maupun udara dengan memperhatikan spare part serta sarana pendukung lainnya, agar dapat dipergunakan seoptimal mungkin.
5. Waskat terhadap penyalahgunaan peralatan Polri/alat angkut hanya untuk kepentingan tugas Polri.
6. Melindungi aset Polri (bangunan, tanah) dengan dokumen kepemilikan untukantisipasi tuntutan dari masyarakat/instansi lain.

C. Bidang pengamanan kegiatan:

1. Senantiasa melaksanakan latihan sesuai dengan program yang telah disusun, agar tercapai dan terpelihara tingkat profesionalisme anggota dan satuan.
2. Mempedomani kebijakan dan strategi Kapolri tentang percepatan pencapaian sasaran prioritas tahun 2005 tanggal 17 Juli 2005.
3. Pengamanan Unras agar dilaksanakan sesuai dengan Protap dan terukur dengan meng-

optimalkan peran negosiator serta tidak terpancing untuk melakukan kekerasan yang mengarah pelanggaran HAM.

4. Pengawasan terhadap pengawasan masyarakat dalam hal penerbitan SIM, STNK, BPKB, Tilang, Senpi/Handak, SKCK, orang asing dan perizinan.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan aparat TNI dan instansi pemerintah, Legislatif, LSM serta tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya.
6. Pengawasan secara ketat terhadap werving/penerimaan anggota Polri dan PNS agar tidak terjadi penyimpangan (pemerasan, penipuan dan KKN).
7. Pengawasan secara ketat terhadap setiap proses sidik perkara agar tidak terjadi penyimpangan (berpihak, rekayasa, manipulasi perkara dll).
8. Menanggapi secara serius komplain dari masyarakat berkaitan dengan kinerja Polri dan menangkal opini negatif yang disuarakan pihak tertentu secara proporsional dan berkualitas.

D. Bidang pengamanan Baket :

1. Melakukan upaya-upaya penertiban terhadap penyimpanan dan distribusi dokumen dari kebocoran dan kerusakan akibat bencana alam ataupun kelalaian.
2. Melakukan tindakan pengamanan secara berlapis terhadap teknologi Infokom yang dimiliki oleh Polri dan senantiasa di up grade sesuai perkembangan kemajuan teknologi.
3. Menempatkan personil secara selektif, berdedikasi dan berkualitas pada fungsi-fungsi yang rawan kebocoran.
4. Melakukan tindakan tegas terhadap anggota/pejabat Polri yang mempublikasikan taktik dan teknik penyidikan maupun hal-hal yang patut dirahasiakan.\*\*\*

## Peran Polri dalam Penegakan Hukum untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi

KEBEBASAN Pers seiring dengan demokrasi, reformasi yang kita alami ditandai oleh makin maraknya penampilan perempuan yang menghiasi Majalah, Tabloid, Koran tanpa sensor yang merupakan bagian dari kebebasan Pers.

Selaku alat negara penegak hukum, Polri berperan sebagai pelaksana terdepan dalam pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi. Dalam penindakan kasus tersebut, sehubungan dengan belum diundangkannya RUU Pornografi dan Pornoaksi, Polri menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi, sebagaimana diatur dalam : Pasal 282 dan 283 KUHP UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman Pasal 40 (tanpa sensor), UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Upaya yang sedang dan akan dilakukan Polri :

1. Melakukan penyelidikan terhadap tabloid-tabloid yang diduga porno untuk dapat diketahui secara pasti mengenai alamat redaksi, pimpinan redaksi, penanggung jawab, redaktur, dan kartunis serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penerbitan tabloid dimaksud.
2. Mengidentifikasi siapa saja yang dapat dijadikan tersangka dalam peredaran tabloid yang diduga porno.
3. Tetap mendorong segera diundangkannya Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi.

Kendala Polri dalam penyidikan tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi :

1. Belum adanya batasan yang resmi tentang pengertian pornografi dengan seni.
2. Penindakan yang dilakukan umumnya baru sebatas pada para pedagang eceran dari tabloid-tabloid yang diduga porno, belum sampai pada pimpinan redaksi karena kesulitan melacak alamat redaksi tersebut yang ternyata fiktif.
3. Belum disyahnkannya RUU anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi Undang-Undang.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada Kasatwil/Kasatker agar berupaya dalam pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi melalui

**1. Pre-emptif**

- a. Membuat arahan ke satuan kewilayahannya untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya Pornografi dan Pornoaksi.
- b. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan LSM.
- c. Meningkatkan kegiatan penyelidikan untuk dapat mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat diungkap secara tuntas.

**2. Represif**

- a. Menindak para pelaku tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Melakukan pengawasan dan razia terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat peredaran barang-barang porno.
- c. Melakukan penyidikan secara tuntas terhadap kasus yang berhasil diungkap dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.\*\*\*

DEWASA ini masalah kekerasan terhadap perempuan semakin menguat, upaya yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang diakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hakikat kehidupan manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan.

Hal tersebut harus dihentikan dan diperbaiki dengan sungguh-sungguh demi, terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan gender, peduli lingkungan, demokratis dan menjunjung tinggi HAM, termasuk di dalamnya hak perempuan sesuai **"deklarasi komitmen negara dalam masyarakat untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan"**

Untuk membantu masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, maka Polri bekerjasama dengan Derap warapsari membentuk **Ruang Pelayanan Khusus (RPK)** disetiap Polda dan Polres, dimana sampai saat ini sudah berjumlah 202 di tingkat Polres, dengan demikian hampir sebagian besar Polres di Indonesia memiliki RPK.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang simpatik dan empatik, penuh pengertian dan profesional.

Tugas dan tanggung jawab Polwan tersebut antara lain adalah:

1. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Membuat laporan Polisi.
3. Persiapan permohonan VetR.
4. Merujuk ke **"pusat krisis terpadu"** RSCM/RSU terdekat.
5. Pemeriksaan saksi korban.
6. Melakukan **"konseling"**
7. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak keluar kepada pihak lain.
8. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.

# Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polri

9. Menyalurkan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau rumah aman apabila diperlukan.
10. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
11. Membuat laporan kegiatan RPK secara berkala ke koordinator RPK (Polda).

Visi dan misi dari ruang pelayanan khusus (RPK) adalah sebagai berikut:

## 1. Visi:

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum, sehingga masalahnya terselesaikan.

## 2. Misi

- A. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- B. Berikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh simpati dan rasa asih kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- C. Membangun jaringan kerjasama antar instansi/badan/lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) ini kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pahami visi, misi RPK dan tugas Polwan di RPK, dan sosialisasikan kepada seluruh anggota, terutama kaitannya dengan masalah persamaan gender, perlindungan terhadap anak dan masalah HAM.
2. Memerintahkan kepada anggota untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya RPK di Polri terutama tentang tujuan daripada RPK.
3. Tempatkan anggota yang benar-benar dianggap mampu untuk

memegang tugas dan tanggung jawab di RPK.

4. Lakukan pelatihan secara rutin bagi anggota yang bertugas di RPK.
5. Jalin kerjasama dengan instansi/badan/lembaga yang terkait dengan baik.
6. Lakukan evaluasi rutin tentang pelaksanaan tugas di RPK, serta laksanakan perbaikan dalam rangka optimalisasi pencapaian tugas.\*\*



## Pengangkatan Kapolri Sebagai Ketua Umum PBVSI

BERDASARKAN SKEP Munaslub PBVSI Nomor : 04/Munaslub/ PBVSI/2005 tanggal 28 September 2005 tentang pengangkatan Jenderal Polisi Drs. Sutanto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI masa bakti 2005-2009. Kapolri diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) yang bertugas membina dan meningkatkan prestasi permainan bola voli di Indonesia.

Sehubungan dengan Surat Telegram Kapolri No Pol : ST/1292/XII/2005 tentang pengangkatan Kapolri sebagai Ketua Umum PBVSI, kepada Kasatwil/Kasatker agar memberikan arahan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membina/memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menggemari olah raga bola voli di daerah masing-masing.
2. Membantu mencari pemain muda yang berbakat dibidang olahraga bola voli.
3. Membina masyarakat untuk lebih mencintai olahraga dan menghindari penyakit masyarakat yang merusak moral dan jasmani serta penyalahgunaan Narkoba, kenakalan remaja, premanisme dan lain-lain.
4. Para Kasatwil diperbolehkan menjadi pembina olahraga bola voli atas permintaan masyarakat sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas.\*\*\*

# Penggunaan Identitas Palsu



**PENANGKAPAN** seorang WNI an Adianto oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya tahun 2003 dan Asep Mulyono Sentosa oleh Polres Purwakarta tanggal 21 November 2005 karena menggunakan KTA Set NCB-Interpol Indonesia palsu.

Dari beberapa kasus penipuan dan pemalsuan kartu identitas Set NCB-interpol Indonesia yang dilaksanakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun modus operandinya oknum-oknum tersebut membuat KTA yang seolah-olah dikeluarkan oleh Set NCB Indonesia. Mereka menamakan dirinya Organisasi Garis Depan (OGD). Dalam kegiatannya para oknum-oknum tersebut dilengkapi dengan atribut Set NCB Interpol Indonesia mulai dari baju, tanda pangkat, topi, rompi, KTA serta Sprin. KTA dan atribut tersebut digunakan oleh para tersangka untuk kegiatan kriminal yang dapat merugikan institusi Set NCB Interpol Indonesia dan juga dapat menimbulkan citra buruk baik bagi set NCB Interpol sendiri maupun Polri di mata masyarakat.

Sehubungan dengan adanya Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/

1214/XII/2005 tentang pemalsuan pengguna identitas palsu, kepada Kasatwil/Kasatker apabila di wilayah hukum ditemukan adanya oknum-oknum yang mengaku pejabat/ anggota Set NCB Interpol Indonesia dan ada indikasi melakukan kegiatan-kegiatan kriminal, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Cek KTA dan Sprin
2. Hubungi Set NCB Interpol Indonesia dengan Telp. 021 7218278 dan 021 7218146
3. Sidik kasus tersebut sampai tuntas
4. Laporkan hasil sidik dan vonis hukuman yang dijatuhkan ke Set NCB-Interpol Indonesia.
5. Guna mengantisipasi kasus serupa dikemudian hari :
  - A. Agar melakukan penyelidikan intensif terhadap kegiatan dan jaringan OGD Interpol.
  - B. Terhadap kemungkinan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan atribut Polri agar para Kasatwil melakukan penertiban tempat-tempat penjualan atribut Kepolisian.\*\*\*